

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inti dari kebijakan dalam undang-undang ini yaitu pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah meskipun sudah melaksanakan otonomi daerah tetap berkewajiban melakukan pelaporan ke pemerintah pusat yang bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan dapat ditunjukkan dalam penyampaian laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan untuk mendukung tercapainya *Good Governance*. Pemerintah secara terus-menerus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah mengikuti regulasi yang ada.

Kementerian Dalam Negeri memberikan instruksi kepada pemerintah daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Instruksi ini mengenai penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang

berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Laporan keuangan di tiap-tiap daerah dituntut untuk memenuhi prinsip transparan dan akuntabel. Hal ini untuk mendorong terwujudnya *Good Governance*, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Realitanya banyak kendala dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Mencermati masalah yang membuat pengelolaan keuangan daerah tidak transparan dan akuntabel, di antaranya: pajak daerah, pengadaan barang dan jasa, administrasi daerah, perjalanan dinas, aset daerah, serta hibah bantuan sosial. Penggolongan didasarkan dengan mencermati beberapa hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan.

Dikutip dari Beritagar.id tanggal 03 Oktober 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I 2018. Di dalamnya BPK melaporkan temuan sebanyak 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliun dalam pemeriksaan yang dilakukan selama enam bulan awal tahun 2018. IHPS I Tahun 2018 ini merupakan ikhtisar dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Permasalahan ini meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun.

Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp2,34 triliun, potensi kerugian senilai Rp1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp6,69 triliun.

Melihat realita yang ada yaitu lemahnya sistem pengendalian intern dan perubahan-perubahan regulasi, maka hal ini terlihat jelas bahwa pengoptimalan sistem sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah. Sistem ini kegunaannya akan lebih optimal jika diimbangi dengan faktor pendukung lainnya. Persepsi Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini dipengaruhi oleh faktor berperilaku organisasi yang meliputi kejelasan tujuan, dukungan atasan dan pelatihan.

Menurut penelitian Yulistia, Novi, Ika. (2017) membuktikan bahwa variabel kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sama seperti penelitian Cyntia (2013) dan Yati (2014). Berbeda dengan hasil penelitian Nurlaela (2010) membuktikan bahwa hubungan negatif antara kejelasan tujuan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian Yulistia dkk (2017) membuktikan bahwa variabel dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pembuktian yang sama seperti penelitian Cyntia (2013) dan Yati (2014).

Penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh variabel pelatihan terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah telah banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan memiliki pengaruh terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah seperti penelitian Cyntia (2013) dan Yati (2014). Namun penelitian Nurlaela (2010) membuktikan bahwa tidak

terdapat hubungan positif antara pelatihan dengan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian.

Adapun implementasi dari sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yulistia dkk (2017) diterapkan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dilakukannya penelitian yaitu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.

Berdasarkan harapan yang ingin dicapai, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan judul **“PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP PERSEPSI KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah dukungan atasan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

3. Apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Dukungan atasan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Pelatihan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi para praktisi Akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan profesinya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan mengenai transparansi dan akuntabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.
3. Bagi peneliti, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan, faktor berperilaku yang meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, teori pendukung lainnya dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data, pengujian data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran – saran yang diperlukan.